

**KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT
DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh
TAUFIK ISMAIL
NIM 1210305114

BANDUNG
1436 H./2014 M.